

**PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DAN
BUKAN PEGAWAI PADA KANTOR PUSAT PERGURUAN TINGGI
NEGERI "X" DI SURABAYA
RATNA AYU KUSUMANINGRUM
Dr.ELIA MUSTIKASARI, SE.,M.Si.,BKP.,Ak.
KKB KK A 300 11 Kus p**

ABSTRAK

Pembangunan nasional di suatu Negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu-membahu. Pemerintah tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, setiap tahun volume penerimaan terutama sektor perpajakan senantiasa diupayakan untuk terus-menerus meningkat.

Sebagai badan hukum yang merupakan wajib pajak dalam ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Perguruan Tinggi Negeri "X" wajib untuk memungut, memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang dalam negeri. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Perguruan Tinggi Negeri "X" yang berstatus Badan Hukum Milik Negara pada periode Tahun 2009?"

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang penerapan perlakuan perpajakan dalam rangka pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji seluruh pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri "X", namun terbatas pada Kantor Pusat Perguruan Tinggi Negeri "X".

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Perguruan Tinggi Negeri "X" tidak seluruhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Tahun 2009. Terdapat kerancuan dalam pengenaan tarif pajak atas penghasilan. Pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 belum dilakukan secara tertib begitu pula dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

National development in any State in effect held by the people's with the government shoulder to shoulder. Government will not be able to bring in play the wheels of government and national development without the financial support primarily from government revenue. One source of government revenue comes from tax revenues. Therefore, every year the volume of tax revenues in particular sectors always strived to continually increase.

As a legal entity that is a taxpayer in the provisions of Taxation

Legislation No. 28 of 2007, State Universities "X" is obliged to collect, cut and paid tax on income paid to employees in this income tax section 21. Income Tax Section 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments by whatever name derived by the taxpayer in the country.

Problems in this research can be formulated as follows: "How is the implementation of withholding, depositing, and reporting of income tax section 21 on State Universities" X "with the status of State Owned Legal Entity during the period of 2009?"

The research approach used is a qualitative approach. This study is not intended to make generalizations about the implementation of withholding tax treatment in order to tax section 21 Income Tax on salaries of all employees at the State University "X", but limited to the head Office of State Universities "X".

From the results of research can be concluded that the implementation of withholding, depositing, and reporting of income tax section 21 on State Universities "X" is not entirely in accordance with the legislation that applies in Tax Year 2009. There is confusion in the imposition of tax on income.

Preparation of Income Tax section 21 withholding evidence has not been done in an orderly manner as well as in terms of the Income Tax reporting.

Keywords: Taxation, Income Tax Section 21